

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Labuhanbatu Utara pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah daerah Agraris, lebih 70% penduduknya bekerja pada sektor pertanian, baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Begitu juga dengan usaha masyarakat pada sektor lain juga berbasis pertanian seperti pariwisata dan industri kecil dan agro industri.

Perkebunan Padang Halaban termasuk dalam wilayah kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara. Perkebunan Padang Halaban merupakan wilayah bentukan Belanda pada masa Kolonial Belanda di Indonesia. Perkebunan Padang Halaban dibuka Belanda sekitar tahun 1990-an dan merupakan perkebunan khusus Kelapa Sawit.

PT. Smart Tbk Padang Halaban Mill mulai dibangun pada tahun 1926, dengan nama PT. Maskapai perkebunan Sumcama Padang Halaban. Pada tahun 1970 seluruh saham perusahaan dijual dengan pihak Asing dan status perusahaan berubah menjadi PMA (Penanaman Modal Asing). Sesuai dengan surat dari BKPM No. 06/V1/1985. Pada tanggal 28 Maret 1985 status perusahaan berubah menjadi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Pada tahun 1991 perusahaan berubah nama menjadi PT. Sinar Mas Agro Resources dan Technology Corporation (PT. Smart Corporation). Dan pada tahun 1999 *Go Public* dengan nama PT. Smart Tbk.

PT. Smart Tbk Padang Halaban mempunyai luas areal 7.370 Ha sesuai dengan HGU No. 95/HGU/BPN/1997 Tanggal 6 Agustus 1997. PT. Smart Tbk Padang Halaban Mill saat ini mempekerjakan sumber daya manusia yang terdiri dari 12 orang Staff dan yang terdaftar dalam SKU terdiri dari 123 Karyawan bulanan dan 36 orang karyawan harian.

Perusahaan perkebunan ini memberi fasilitas kepada karyawan, disamping gaji dan catu beras setiap 2 minggu sekali, juga memberi fasilitas rumah, air, listrik PLN (yang disubsidi perusahaan), juga pengobatan, pendidikan dan sarana olahraga bagi keluarga karyawan. Desa Perkebunan Padang Halaban memiliki kondisi ekologi yang sesuai untuk Perkebunan Kelapa Sawit yaitu wilayah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Di samping itu tanahnya gembur dan subur.

Menurut Pahan (2012:42):

“Perkebunan Indonesia telah melewati perjalanan sejarah yang panjang. Lebih dari lima abad yang lalu, lautan nusantara telah ramai oleh lalu lintas perdagangan komoditi utama produk perkebunan, seperti lada, pala, cengkeh, dan rempah-rempah yang kemudian berkembang dengan komoditi tambahan, seperti kakao, kopi, karet dan kelapa sawit yang tetap menjadi produk utama dalam prekonomian nasional”.

Pada awalnya, perkebunan merupakan sistem perekonomian pertanian komersial yang bercorak kolonial. Sistem perkebunan ini dibawa oleh perusahaan kapitalis asing yang sebenarnya merupakan sistem perkebunan Eropa (*European plantation*). Sistem perkebunan Eropa sangat berbeda dengan perkebunan rakyat (*Garden system*). Yang bersifat tradisional dan di usahakan dalam skala kecil dengan penyertaan modal yang seadanya.

Perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah (dulunya milik Belanda yang sekarang telah dinasionalisasi) yang berbeda dalam aturan pada tahun 1968 mencapai 28 unit manajemen. Manajemen tersebut juga di persempit secara umum menurut kelompok-kelompok dan lokasi secara geografis. Setiap unit, atau PNP (perusahaan Negara Perkebunan), memiliki markas di Medan, atau disalah satu perkebunan yang terletak di daerah bagian tengah dan mencakup sekitar 13.000 dan 44.000 hektar perkebunan. Setiap unit dikepalai oleh seorang Direktur yang menentukan dan bertanggung jawab atas urusan pertanian.

Dalam hirarki perusahaan, terdapat kelompok yang berada dibawah mereka, yaitu manajer perkebunan, lingkaran kecil dari asisten dalam bidang administrasi. Mereka adalah kelompok representasi dari otoritas negara dan/ atau perusahaan yang paling langsung berhubungan dengan masyarakat perkebunan. Walaupun anggaran dan garis-garis besar perkebunan ditentukan oleh kementerian pertanian serta direksi PNP, manajer perkebunan diberikan kebebasan relatif dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan pemekerjaan dan pemecatan personel, penggunaan buruh-buruh lepas dan negosiasi dengan kontraktor-kontraktor buruh.

Pada masa lampau, perkebunan berfungsi sebagai sumber produksi yang menghasilkan berjuta-juta kepada pemerintah Kolonial, namun dari dana yang diperoleh itu sedikit sekali yang digunakan untuk membangun daerah ajjahan. Dengan demikian terjadi keadaan yang sangat berbeda antara perkebunan dan daerah sekitarnya.

Hal ini juga dikarenakan golongan Eropa mulai terarah ke kota untuk mencari hiburan atau rekreasi. Kota-kota Bandung, Malang, Medan berkembang pesat karena menjadi pusat pemukiman dan pelayanan bagi kaum perkebunan.

Untuk keperluan pegawai pabrik, disediakan berbagai fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi yang juga terbuka bagi masyarakat di sekitarnya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah kolonial telah mengintegrasikan rakyat pedesaan dengan masyarakat pabrik bukan malah mengisolasi.

Menurut Pahan (2012:45)

‘Nasionalisasi perusahaan perkebunan milik swasta Belanda dipicu oleh tuntutan pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Belanda tentang kedaulatan Irian Barat (sekarang Papua). Sejak gagalnya pemerintah Indonesia memperoleh dukungan untuk kedaulatan Indonesia di Irian Barat pada pemungutan suara di PBB pada tanggal 29 November 1957, timbul pemogokan buruh yang bekerja di perusahaan perkebunan Belanda. Pemogokan ini segera disusul dengan tindakan pengambilalihan perusahaan dan perkebunan-perkebunan Belanda oleh para buruh’.

Dari uraian diatas, produksi Perkebunan Padang Halaban merupakan pilar utama dalam pengembangan sektor industri pengolahan kelapa sawit. Dan juga diarahkan dalam rangka menciptakan keselamatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sektor penghasil Devisa Negara.

Penerimaan upah buruh pada masa Orde Baru juga tidak membaik dibandingkan dengan masa sebelumnya, malah justru menurun dibandingkan dengan masa ordonansi kuli.

Pada tahun 1985 pada saat itu boleh dikatakan situasi perekonomian Indonesia tergolong stabil malah mendapatkan “*Swasembada Beras*”. Sistem

pengupahan buruh di Perusahaan Perkebunan pada intinya didasarkan atas kontrak kerja. Kontrak kerja tersebut bisa atas dasar borongan dan harian.

Berdasarkan uraian diatas, saya sebagai peneliti ingin mengangkat latar belakang sejarah Perkebunan Padang Halaban, dengan judul penelitian **“Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Perkebunandi Padang Halaban kabupaten Labura (1991-2013)”**.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sejarah perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013.
2. Kehidupan sosial ekonomi buruh perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013.
3. Sistem perekrut buruh perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada : “Kehidupan Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013”.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013.
2. Bagaimana sistem perekrut buruh perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013.
3. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi buruh perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013.
2. Untuk mengetahui sistem perekrutan buruh perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013.
3. Untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi buruh perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura 1991-2013.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah wawasan peneliti tentang kehidupan sosial ekonomi buruh perkebunan di Padang Halaban Kabupaten Labura.
2. Memberikan pengetahuan bagi peneliti tentang kondisi kehidupan sosial buruh perkebunan di Padang Halaban.
3. Untuk menambah wawasan peneliti tentang kekerasan yang dialami oleh buruh pekerja perkebunan Sumatera Utara.

4. Memberi informasi dan pemahaman kepada masyarakat kota Medan bahwa perkebunan di Padang Halaban berperan dalam kehidupan sosial ekonomi.
5. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk referensi bahan perbandingan terhadap hasil penelitian yang telah ada maupun digunakan bagi peneliti lain sebagai bahan rujukan.
6. Sebagai bahan masukan bagi Lembaga Pendidikan umumnya dan UNIMED khususnya.

THE
Character Building
UNIVERSITY